



Wacana Pancasila Dalam Era Reformasi (Studi Kebudayaan Terhadap Pasang Surut Wacana Pancasila dalam Kontestasi Kehidupan Sosial dan Politik)

Oleh

Arief Rachman, Irwan Abdullah, Djoko Surjo¹

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara telah mendapat tempat di hati para pemimpin bangsa ini. Sebaliknya, pancasila belum mendapat tempat dalam kehidupan bersosial dan berpolitik bangsa ini. Konflik sosial, politik masih terjadi dibawah kepaikan sayap Pancasila, masalah muncul ketika Pancasila dipahami sebagai instrumen negara, tetapi belum menjadi paham negara. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai ritualitas Pancasila yang belum menyentuh keyakinan berbangsa dan bernegara masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya menggeser pemahaman Pancasila dari bentuk instrumental dengan sekadar menghafal sila Pancasila, menuju bentuk kontestasi dengan terlibat dalam “arena” Pancasila.

Kata Kunci : Pancasila, Ideologi, Kontestasi, Cultural Studies

Abstract

Pancasila as the foundation of state and nation has a special position in the heart of Indonesia's leader. In contrast, Pancasila has not get a prestigious place in social and political life. Social and political conflict still happens in the name of Pancasila. The problem arises when people only understand Pancasila as a tool for the state. This is shown in Pancasila's rituality that has not touch the fundamental believe of the nation. It is important to shift the meaning of Pancasila from instrumental into contestation in the field of Pancasila.

Keywords: Pancasila, ideology, contestation, cultural studies.

A. Pendahuluan

Pada awal kemerdekaan, wacana ideologi atau orientasi nilai dasar apa yang akan menjadi pilihan sebagai pedoman arah perjalanan berbangsa, terus mewarnai perdebatan di kalangan elite politik negeri ini. Pada saat itu obsesi sebagai bangsa merdeka telah terwujud, kemudian para pendiri

bangsa terus berusaha mencari nilai-nilai fondasional apa yang sekiranya berpotensi menjadi pengikat identitas sebuah bangsa. Kondisi obyektif Indonesia yang plural ditilik dari faktor keyakinan, etnis, ras, dan kemudian orientasi politik yang penuh varian, membuat semakin sulit merumuskan basis ideologis yang sekiranya mampu mengikat

¹ Arief Rachman adalah mahasiswa program doktoral S3 di Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Irwan Abdullah adalah Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya, UGM. Pengajar pada Jurusan Antropologi, UGM. Djoko Suryo adalah Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

sebagai sebuah bangsa. Adalah Soekarno dan beberapa tokoh lain yang kemudian mencoba menawarkan sebuah ideologi yang dipandang mencakup dan sesuai dengan kondisi sosio-kultural serta politik bangsa Indonesia, yaitu yang dulu hingga sekarang dikenal dengan Pancasila. Sejak saat itu wacana (discourse) tentang Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut mengikuti dinamika sistem politik yang berlaku di Indonesia.

Ketika Soekarno berkuasa, dunia internasional diwarnai oleh tarik menarik ideologi yang sangat kuat, yaitu antara liberalisme-kapitalisme di satu pihak, dan sosialisme-komunisme di pihak lain. Situasi konfliktual itu juga mewarnai pertarungan ideologis di Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai era maraknya politik aliran. Secara politik kekuatan politik di awal kemerdekaan terbagi ke dalam beberapa aliran ideologis, yaitu golongan nasionalis, Islam politik, sosialis, dan komunis. Varian ideologis ini kemudian mewujud dalam kekuatan politik kepartaian, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berbasis nasionalisme, Partai Majelis Suro Indonesia (Masyumi) dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berbasis Islam, dan kemudian Partai Komunis Indonesia (PKI) serta Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang mengusung ideologi kiri. Melalui partai politik itu kemudian berbagai aliran ideologis tersebut berkontestasi merebut kekuasaan melalui Pemilihan Umum pada tahun 1955 yang diikuti oleh puluhan partai politik. Pemilu pertama kali itu kemudian menghasilkan empat kekuatan politik besar yang mencerminkan kekuatan politik aliran, secara berturut-turut adalah PNI, Partai Masyumi, NU, dan PKI.

Berkait dengan pilihan ideologi mana yang akan menjadi pilihan utama untuk panduan arah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pada era pemerintahan Soekarno hanya diwarnai oleh tarik-menarik antara kekuatan Islam politik dan nasionalis. Isu ini berkaitan dengan pilihan ideologi apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Pada kubu Islam politik menuntut agar Indonesia berdasarkan agama, yaitu Islam dengan pertimbangan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sementara kubu nasionalis dengan pertimbangan kondisi obyektif Indonesia yang plural, menawarkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebegitu jauh, setelah melalui perdebatan panjang, terutama pada Sidang Konstituante, akhirnya tawaran kubu nasionalis yang diterima, dan dengan demikian Pancasila “diterima” sebagai dasar negara. Akan tetapi, sebagai sebuah kesepakatan politik, Pancasila belum dianggap selesai dan terus membuka perdebatan di antara kedua kubu tersebut. Oleh karena itu, bangsa Indonesia terus mengalami disorientasi, karena belum ada kesepakatan final tentang nilai dasar apa yang akan menjadi arah dan pedoman dalam kehidupan sosial politik dan kebudayaan. Kekuatan Islam politik terus menggelindingkan wacana ideologi Islam sebagai dasar negara, dan spirit untuk mewujudkan cita-cita negara Islam terus hidup laten. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya kekuatan Islam politik terpecah-pecah, tetapi tetap gerakan yang menggelindingkan wacana ideologi Islam terus berkembang sebagai wacana alternatif ideologi Pancasila.

Dalam situasi seperti itu, perpolitikan Indonesia memasuki babak baru yang kemudian dikenal sebagai era Orde Baru, menyusul jatuhnya pemerintahan Soekarno. Melalui pergolakan politik yang dramatik dan membawa korban jiwa jutaan orang, terutama dari kubu pendukung ideologi komunis, lahirlah kemudian sistem politik yang sentralistik di bawah pimpinan Soeharto. Dengan dukungan Amerika Serikat, Soeharto tampil sebagai pemimpin kuat dan membawa Indonesia dalam situasi politik stabil, sehingga pembangunan ekonomi yang lebih kapitalistik semakin terasa signifikan. Berbagai krisis ekonomi dan keuangan pasca pemerintahan Soekarno pelan tapi pasti berhasil diatasi oleh Soeharto dengan dukungan kekuatan kapitalisme internasional. Melalui kebijakan yang membuka bagi kekuatan kapitalisme internasional, maka aliran modal asing dari negara-negara industri Barat dan pro Barat semakin deras. Pertumbuhan ekonomi dan berbagai pembangunan infrastruktur berhasil dipacu dan berlangsung dengan cepat.

Obsesi untuk terus mempertahankan momentum pembangunan dengan titik berat sektor ekonomi, terus mendorong pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan politik yang tujuan utamanya adalah stabilitas nasional. Untuk itu pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, dan sekaligus menjadi instrumen kunci bagi jaminan stabilitas nasional, yang pada saat itu menjadi legitimasi demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Tafsir paham negara integralistik dan paradigma konsensus sangat populer terhadap kandungan nilai Pancasila. Bersamaan dengan itu, wacana Pancasila

sebagai ideologi sangat mendominasi dalam berbagai arena baik pada institusi pendidikan, birokrasi, organisasi profesi, organisasi keormas, organisasi kepemudaan, dan bahkan organisasi keagamaan. Melalui lembaga bentukan pemerintah yang kemudian populer dengan sebutan BP7, wacana Pancasila terus menggelinding secara intensif dan masif ke berbagai bidang kehidupan. Penataran Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau populer dengan sebutan P4 terus diselenggarakan sebagai proyek ideologi pemerintah yang mengharuskan seluruh organisasi politik kemasyarakatan, birokrasi, dan lembaga pendidikan mengikutinya. Pada periode ini, wacana Pancasila benar-benar mendominasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga Pancasila begitu populer di semua kalangan.

Bersamaan dengan itu, wacana politik keagamaan sebagai sebuah alternatif mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara praktis surut di tengah pasangannya wacana ideologi Pancasila. Bahkan melalui penyebaran wacana ekstrim kanan oleh pemerintah, sebuah sebutan bagi kelompok Islam politik yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, menyebabkan wacana keagamaan dalam politik kenegaraan benar-benar berada pada titik terendah. Kekuatan politik Islam praktis mengalami ketidakberdayaan, dan bahkan terus terpinggirkan dalam gegap-gempita politik pembangunan yang dikontrol oleh kekuatan militer. Semua forum komunikasi, termasuk forum komunikasi tradisional di perdesaan, digunakan secara efektif oleh pemerintah untuk menyebar-luaskan wacana Pancasila. Berbagai media massa juga "diharuskan" mengangkat wacana Pancasila sebagai ideologi

negara, dan demikian pula buku, leaflet, brosur, dan sejenis terus diproduksi berisi wacana Pancasila.

Pancasila sebagai wacana dominan mengalami puncak intensitas dan perluasannya ketika pemerintah Orde Baru mengharuskan semua organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik kepartaian menggunakan Pancasila sebagai asasnya. Di sinilah kemudian ditetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi setiap organisasi, tidak peduli apa yang menjadi paham dasar organisasi tersebut. Partai politik yang berpaham Islam pun, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, harus berasaskan Pancasila, dan bahkan ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU juga diharuskan menerima Pancasila sebagai asas tunggal.

Pancasila di masa Orde Baru merupakan ideologi yang sengaja didesain menjadi ideologi yang bersifat state-centered theory yang diterapkan dalam kerangka bagaimana agar masyarakat patuh dan tunduk. Negara dengan berbagai cara melakukan penaklukan tersebut yang berdampak pada tingkat kepatuhan yang sangat tinggi melalui apa yang disebut state apparatus. Terlepas dari Pancasila sebagai instrumen politik Orde Baru, tetapi pada fase ini wacana Pancasila benar-benar mendominasi atmosfir kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fase ini wacana Pancasila mengalami pasang.

Ketika berakhirnya era Orde Baru, terjadi perubahan sistem politik dari otoritarian ke sistem politik demokratik, Indonesia memasuki apa yang dikenal sebagai era reformasi. Fase ini terjadi perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sangat jauh berbeda karakternya dari fase pemerintahan sebelumnya.

Negara tidak tampil begitu perkasa seperti pada era Orde Baru, tetapi mengalami pelemahan terhadap berbagai kekuatan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, negara tidak lagi memiliki otonomi relatif terhadap kekuatan di luar pemerintahan, termasuk media massa, sehingga kontrol negara sangat lemah dan bahkan tidak berdaya. Sebaliknya, kekuatan masyarakat semakin menguat, baik melalui organisasi maupun kekuatan sporadis yang terekspresi dalam berbagai bentuk aksi unjuk rasa. Tindakan anarkisme massa pun sering terjadi, dan konflik antarsuku, antaragama, dan antargolongan terjadi secara susul-menyusul. Berbagai penjarahan terhadap aset negara seperti hutan dan sektor pertambangan oleh kekuatan sporadis massa sering terjadi. Simbol-simbol negara seperti kantor pemerintahan, kantor kepolisian, dan kantor legislatif sering menjadi sasaran amuk massa.

Uraian di atas menunjukkan bahwa saat ini terjadi perubahan wacana dan paradigma mengenai keberadaan Pancasila. Pancasila telah dijadikan sebagai arena kontestasi di satu sisi, dan sebagai arena negosiasi di sisi lain. Bahkan, terdapat pula upaya yang dengan berbagai cara meminggirkan Pancasila sehingga mengalami perubahan-perubahan yang mengancam keutuhan bangsa sehingga ia pun terus dibawa pada perdebatan-perdebatan baik politis maupun akademis. Hal ini menjadikan posisi Pancasila yang ditempatkan pada arena kontestasi dan negosiasi tidak hanya merupakan sebuah fenomena kebangsaan yang harus direspons dengan bijak, tetapi juga merupakan persoalan akademik yang membutuhkan kajian dan diskusi yang mendalam

untuk menemukan sebuah jawaban terhadap persoalan tersebut.

Beberapa permasalahan dapat diajukan antara lain: bagaimana pasang-surut wacana Pancasila dalam kontestasi di kalangan kekuatan sosial politik pada era reformasi?; bagaimana dan terjadinya pewacanaan Pancasila sebagai ideologi negara mengalami proses ironisasi dalam praksis kehidupan sosial politik dan kebudayaan pada era reformasi? Dan bagaimana ideologi keagamaan beroperasi meminggirkan wacana Pancasila sebagai ideologi negara?

B. Teorisasi Pancasila

Sudah lama persoalan ideologi menjadi perhatian utama dalam kajian ilmu sosial. Perhatian itu semakin besar ketika berbagai paham besar, seperti kapitalisme, sosialisme, dan komunisme mendominasi aktivitas dunia. Sejak munculnya era pencerahan, yang merupakan respons kritis atas era sebelumnya, yaitu dominasi ideologi agama, peradaban manusia berkembang sangat cepat dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai temuan mendasar saling susul menyusul, berkat perubahan paradigma berpikir seperti positivisme dan empirisme. Mulai dari ditemukannya bahwa bumi ternyata bulat, hukum gravitasi bumi, energi uap, listrik, dan kemudian relativisme, peradaban manusia berkembang semakin kompleks. Moda produksi pun kemudian berubah dari yang tadinya feodalisme sebagaimana ada dalam masyarakat agraris, kemudian berubah menjadi kapitalisme menyusul munculnya masyarakat industrial. Di sinilah kemudian ideologi

menjadi penting dan terbukti menjadi daya gerak yang mengontrol tindakan orang baik secara individu maupun kelompok. Adalah Karl Marx, orang yang cukup gelisah terhadap makin kuatnya pengaruh kapitalisme bagi proses produksi yang dianggapnya dehumanistik. Karena itu ia mulai menganalisis tentang ideologi dalam kaitannya dengan kapitalisme.

Perhatian Marx terhadap konsep ideologi berakar pada kegagalan revolusi proletar dan ketidakmampuan materialisme historis dalam kaitannya dengan pertanyaan subjektivitas, makna dan politik kultural. Sederhananya, perhatian untuk membahas ideologi dimulai sebagai suatu eksplorasi atas pertanyaan mengapa kapitalisme, yang diyakini sebagai suatu sistem eksploitatif dalam relasi sosial dan ekonomi, tidak dapat diruntuhkan oleh revolusi kelas pekerja. Apakah kegagalan revolusi proletar serta-merta menjadi kegagalan kaum proletar dalam memahami secara tepat dunia tempat mereka hidup? Apakah kelas pekerja menderita "kesadaran palsu", yang merupakan suatu pandangan-dunia berjuis yang salah yang mengabdikan kepada kelas kapitalis? (Barker, 2000: 58).

Dalam kaitannya dengan materialisme, Marx menggunakan istilah ideologi untuk merujuk kepada sistem-sistem aturan ide-ide yang sekali lagi berusaha menyembunyikan kontradiksi-kontradiksi yang berada di pusat sistem kapitalis. Pada kebanyakan kasus, mereka melakukan hal ini dengan salah satu dari tiga cara berikut: (1) mereka menghadirkan suatu sistem ide, sistem agama, filsafat, literature, hukum yang menjadikan kontradiksi-kontradiksi tampak koheran; (2) mereka menjelaskan pengalaman-pengalaman

tersebut yang mengungkapkan kontradiksi-kontradiksi, biasanya sebagai problem personal atau keanehan-keanehan individual; atau (3) mereka menghadirkan kontradiksi kapitalis sebagai yang benar-benar menjadi suatu kontradiksi pada hakikat manusia dan oleh karena itu satu hal yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan sosial (Ritzer, 2004: 71).

Sementara itu Althusser, yang merupakan seorang Marxis, mengartikan ideologi sebagai sistem (dengan logika dan kaidahnya sendiri) representasi (citra, mitos, gagasan atau konsep) dipahami sebagai praktik yang dijalani dan mentransformasikan dunia materi. Ada empat aspek dalam karya Althusser yang menjadi inti pandangannya tentang ideologi: 1) ideologi memiliki fungsi umum untuk membentuk subyek; 2) ideologi sebagai pengalaman yang dijalani tidaklah palsu; 3) ideologi sebagai pemahaman yang keliru tentang kondisi nyata eksistensi adalah palsu; dan 4) ideologi terlibat dalam reproduksi formasi-formasi sosial dan relasi mereka terhadap kekuasaan. Dalam esainya yang berjudul *Ideology and the Ideological State Apparatuses*, berpendapat bahwa ideologi memuji dan mempertanyakan individu sebagai subyek konkret. Ideologi berfungsi untuk membentuk individu konkret sebagai subyek. Argument ini adalah bagian dari antihumanisme Althusser di mana subyek dilihat bukan sebagai agen yang membentuk dirinya sendiri, melainkan sebagai 'efek' dari struktur. Dalam hal ini, hasil kerja ideologilah yang mewujudkan subyek karena tidak ada praktik melainkan oleh dan di dalam ideologi. Singkatnya, diskursus ideologi mengonstruksi posisi subyek atau tempat subyek berpijak ketika dia memahami dunia (Barker, 2000: 60).

Di mana letak ideologi itu? Menurut Althusser ideologi ada dalam suatu apparatus dan praktik yang menyertainya; walhasil, dia terus menjadikan seperangkat institusi, terutama keluarga, sistem pendidikan, gereja dan media massa, sebagai 'apparatus negara ideologis (ideological state apparatuses) atau yang populer dengan singkatan ISAs. Kendati dia memandang gereja sebagai ISA prakapitalis yang dominan, dia berpendapat bahwa di dalam konteks kapitalisme, gereja telah digantikan oleh sistem pendidikan, yang berimplikasi pada reproduksi ideologis (dan fisik) tenaga kerja dan relasi produksi secara sosial. ideologi, katanya, merupakan sarana yang jauh lebih efektif bagi peneguh kekuasaan kelas ketimbang kekuatan fisik (dalam Barker, 2000: 63).

Pandangan Althusserian ini cukup memiliki pengaruh dalam Cultural Studies, terutama dalam perdebatan soal ideologi. Lebih jauh, pemikiran Althusserian tentang formasi sosial sebagai suatu struktur kompleks dari posisi-posisi yang saling terkait namun relatif otonom dapat dilihat dalam karya Stuart Hall, Ernesto Laclau, dan Chantal Mouffe. Akan tetapi, Althusserian dalam Cultural Studies tetap dilihat secara kritis dan dalam beberapa hal dianggap memiliki kekurangan, terutama menempatkan ISAs dalam posisi yang begitu menentukan. Beroperasinya ISAs dianggap terlalu fungsionalis, sehingga ideologi tampak berfungsi di belakang punggung masyarakat atau mengontrol tindakan, tanpa memberi peluang adanya agen.

Cara pandang Althusserian ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana posisi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa Orde Baru hingga

sekarang pun, masih banyak wacana dalam perdebatan dan pemahaman tentang Pancasila yang mengikuti formulasi ideologi Althusserian tersebut. Sebagai rumusan yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara yang harus menentukan dalam setiap tindakan individu maupun kelompok. Dalam bahasa Orde Baru Pancasila harus menjadi faktor menentukan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proyek ideologisasi Pancasila oleh negara, seperti melalui P4 merupakan contoh penting cara memahami ideologi seperti pandangan Althusserian tersebut.

Pancasila sebagai ideologi di sini berperan sebagai referensi bagi pembentukan identitas baru sebagai warga-negara. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kategori baru yang mengatasi batasan-batasan berdasarkan agama tertentu. Kemanusiaan menunjuk pada nilai universal. Kedua, prinsip ini mencerminkan peralihan dari lingkup yang partikularistik kepada yang universalistik, sebagai gejala modernisasi. Prinsip persatuan Indonesia menunjuk kepada referensi kelompok yang baru dan ikatan yang baru. Sedangkan kerakyatan dan keadilan sosial merupakan prinsip yang dituntut dari status baru sebagai warganegara yang sama.

Pengaruh Althusserian itu juga tampak bagaimana memahami Pancasila sebagai ideologi. Dengan mengutip dari Thomson (1984), Sastraprateja misalnya mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Dalam ideologi terkandung beberapa unsur, pertama, adanya suatu

penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Pancasila ditempatkan secara keseluruhan konteks Pembukaan UUD 1945 menunjukkan adanya interpretasi terhadap sejarah bangsa Indonesia di masa lalu serta bagaimana seharusnya sejarah itu terbentuk di masa depan. Kedua, setiap ideologi memuat seperangkat nilai-nilai atau suatu preskripsi moral. Pancasila dengan jelas merupakan seperangkat nilai dan atas dasar nilai itu masyarakat ingin ditata. Ideologi secara implisit memuat penolakan terhadap sistem lainnya. Ketiga, ideologi memuat orientasi pada tindakan, ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Pemahaman terhadap kenyataan tidak hanya bertujuan untuk memberi informasi dan menjelaskan, tetapi agar sesuatu dikerjakan, yaitu mentransformasikan dunia. Oleh karena itu dapat dikatakan ideologi memuat suatu interpretasi, etika dan retorika. Dikatakan ideologi sebagai retorika, karena merupakan pernyataan tentang sesuatu kepada seseorang, sehingga ia tidak hanya berdiri dan diam saja, tetapi "berbuat" sesuatu (Sastraprateja, 1991: 142).

Tampak jelas pada pemahaman seperti itu menempatkan bahwa ideologi adalah faktor menentukan. Bahkan gambaran sejarah masa depan sudah harus dikontrol oleh seperangkat nilai yang diyakininya benar, sehingga jika ada nilai baru atau nilai lain yang muncul dalam perjalanan perubahan sosial, tidak dimungkinkan adanya. Di sini, kemudian mengkondisikan adanya kekuatan daya gerak dari sebuah ideologi, dan tentu memiliki penafsir yang berangkat dari prinsip universalistik. Partikularistik adalah ancaman, karena itu tidak bisa

dibiarkan tumbuh atas tafsir lain yang berbeda dari tafsir pihak yang umumnya sedang berkuasa. Oleh karena itu pula pada era Orde Baru Pancasila lebih banyak tafsir dari kelompok penguasa, dan sebagai ideologi dalam bahasa Orde Baru harus dipahami secara utuh. Jadi tafsir model ISAs terhadap Pancasila merupakan sumber utama wacana tentang Pancasila yang tidak boleh ada perbedaan tafsir. Karena itu, Pancasila dalam periode itu sesungguhnya menjadi ideologi yang tertutup.

1. Ideologi Gramscian versus Kontemporer

Satu pemahaman yang relevan terhadap ideologi dalam perspektif Cultural Studies, datang dari Gramsci. Dalam analisis Gramscian, ideologi dipahami sebagai ide, makna, dan praktik yang, kendati mengklaim sebagai kebenaran universal, merupakan peta makna yang sebenarnya menopang kekuasaan kelompok sosial tertentu. Di atas itu semua, ideologi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas praktis kehidupan, namun ia adalah fenomena material yang berakar pada kondisi sehari-hari. Ideologi menyediakan aturan perilaku praktis dan tuntutan moral yang sepadan dengan agama yang secara sekuler dipahami sebagai kesatuan keyakinan antara konsepsi dunia dan norma tindakan terkait (Gramsci, 1971: 349).

Suatu blok hegemonik tidak pernah terdiri dari kategori sosio-ekonomi tunggal, namun dibentuk melalui serangkaian aliansi di mana suatu kelompok berposisi sebagai pemimpin. Ideologi memainkan peran krusial dalam membiarkan aliansi kelompok ini (awalnya dikonsepsikan dalam terminology kelas) menanggalkan kepentingan sempit usaha-ekonomi dan mengutamakan kepentingan 'nasionalis-populer'. Jadi satu kesatuan sosio-kultural'

diperoleh melalui aneka ragam kehendak, yang tujuan heterogenya secarabersama-sama dimasukkan ke dalam suatu tujuan tunggal, sebagai basis suatu konsepsi tentang dunia yang adil dan alamiah (Gramsci, 1971: 349).

Salah satu konsep kunci yang ditawarkan Gramsci adalah apa yang populer sebagai hegemoni. Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai proses berkelanjutan pembentukan dan penggulingan keseimbangan yang tidak stabil antara kepentingan kelompok-kelompok dominan dan kepentingan kelompok subordinat, keseimbangan dimana kepentingan kelompok dominan hadir, namun hanya pada batas-batas tertentu (Gramsci, 1968: 182). Hegemoni dapat dipahami dalam konteks strategi dimana pandangan dunia dan kekuasaan kelompok sosial panutan (apakah mereka berupa kelas, seks, etnik atau nasionalitas) dipelihara.

Selanjutnya Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan budaya yang dijalankan oleh kelas yang berkuasa. Ia mempertentangkan antara hegemoni dengan kursi yang dijalankan oleh kekuasaan legislatif atau eksekutif atau juga polisi. Jadi hegemoni lebih menunjukkan pada proses penundukan terhadap kelompok secara sistematis, sehingga yang menjadi sasaran tersebut tidak sadar kalau dikuasai atau dikontrol. Di sini yang menjadi sasaran kontrol adalah kesadarannya, karena itu yang dipengaruhi oleh sebuah ideologi misalnya, akan merayakan ketundukannya itu.

Adapun teori hegemoni yang dicetuskan Gramsci adalah sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun

perorangan; (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral. Berdasarkan pemikiran Gramsci tersebut dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya sampai kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi. Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan. Kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. Masyarakat kelas dominan merekayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.

Pengaruh Gramscian ini cukup mewarnai dalam Cultural Studies, terutama ketika menjelaskan tema-tema dan topik keterpinggiran sebuah entitas budaya. Namun demikian konsepsi tentang ideologi Marxian cukup mendapat kritik dari berbagai pihak yang melihat bahwa dominasi kebudayaan tidaklah mutlak. Artinya, jika kaum Gramscian atau neomarxian lainnya memandang bahwa kebudayaan memiliki pusat dominan baik dalam produksi maupun pemaknaannya, maka muncul kritik atas itu yang berpandangan sebaliknya. Collins (1989) misalnya, menolak istilah hegemoni yang senantiasa mengandaikan adanya kelompok dominan, tetapi ia menekankan bahwa kebudayaan

pada prinsipnya juga bersifat heterogen baik dari segi jenis teks yang dihasilkan maupun makna yang bersaing di dalam teks.

Begitulah, versi Marxis ideologi membatasi pemakaiannya pada ide-ide yang diasosiasikan dengan, dan guna melanggengkan kekuasaan, kelas dominan. Belakangan, versi yang diperluas dari konsep ini menambahkan pertanyaan tentang gender, etnisitas, umur, dan lain-lain ke dalam kelas. Argumen Giddens bahwa ideologi harus dipahami dalam hal bagaimana struktur signifikasi dimobilisasi untuk mengesahkan kepentingan sepihak kelompok hegemonik (Giddens, 1979: 6) adalah definisi kontemporer ideologi yang mengikuti pandangan ini. Dengan kata lain, ideologi mengacu pada bagaimana makna digunakan untuk menjustifikasi kekuasaan kelompok berkuasa yang mencakup banyak kelas, juga kelompok sosial yang didasarkan atas ras, gender, umur, dan lain-lain.

Jadi, kalau versi Althusser dan Gramscian serta lainnya melihat ideologi sebagai suatu yang menjustifikasi tindakan kelompok dominan, maka versi Giddens tetap mengacu pada ide yang berkuasa, tetapi sesuatu yang menjustifikasi pada semua kelompok masyarakat. Dengan kata lain, kelompok pinggiran dan kelompok subordinat pun memiliki ideologi dalam hal pengorganisasian dan justifikasi ide tentang diri mereka sendiri dan dunianya. Jadi di sini, mengandaikan adanya agen yang meskipun tidak berdaya, tetap memiliki potensi untuk bersikap aktif terhadap beroperasinya ideologi arus utama. Sebuah negosiasi, atau perlawanan tetap hidup laten pada setiap kelompok, sekalipun subordinat.

Berbagai rumusan tentang ideologi yang lebih dinamis itu misalnya tergambar dari perumusan yang lebih kontemporer. Misalnya James Lull mengatakan, dalam pengertiannya yang lebih umum, ideologi adalah pikiran yang terorganisir, kelengkapan nilai-nilai, orientasi, dan kecenderungan yang membentuk perspektif ideasional yang diungkapkan melalui teknologi media dan komunikasi interpersonal. Ideologi kadang mungkin kadang tidak didasarkan pada sejarah atau secara empirik merupakan fakta yang teruji. Mereka bisa menjadi terorganisir secara ketat tapi bisa juga bersifat longgar. Satu ideologi adakalanya kompleks dan terintegrasi dengan baik; tetapi yang lain ada juga yang bersifat fragmentatif. Suatu ideologi kadang ada yang berumur pendek, tetapi ada juga yang berlaku terus-menerus. Ada juga ideologi begitu diberlakukan langsung ditolak oleh khalayak, tetapi ada juga yang begitu sukses dianut dan dibela oleh penganutnya.

Ideologi adalah ungkapan yang pas untuk menggambarkan nilai-nilai dan agenda publik dari suatu bangsa, kelompok agama, calon politisi dan gerakan-gerakan sosial politik, organisasi bisnis, sekolah, kesatuan buruh, bahkan tim olahraga profesional dan group band musik rock. Tetapi istilah ideologi lebih sering merujuk pada hubungan antara informasi dan kekuatan sosial dalam skala besar, yang berkaitan dengan konteks ekonomi-politik. Raymond Williams menyebut ideologi sebagai seperangkat ide yang berasal dari seperangkat kepentingan material, atau lebih luas, dari kelompok atau kelas tertentu. Sedangkan Stuart Hall berpendapat bahwa ideologi tidak hanya merupakan otoritas ekonomi, tetapi membentuk

dan mempertahankan pembagian kelas sosial di Kerajaan Inggris dan masyarakat kapitalis lainnya.

2. Pancasila sebagai Ideologi

Pancasila sebagai ideologi di sini berperan sebagai referensi bagi pembentukan identitas baru sebagai warganegara. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kategori baru yang mengatasi batasan-batasan berdasarkan agama tertentu. Kemanusiaan menunjuk pada nilai universal. Kedua, prinsip ini mencerminkan peralihan dari lingkup yang partikularistik kepada yang universalistik, sebagai gejala modernisasi. Prinsip persatuan Indonesia menunjuk kepada referensi kelompok yang baru dan ikatan yang baru. Sedangkan kerakyatan dan keadilan sosial merupakan prinsip yang dituntut dari status baru sebagai warganegara yang sama.

Kewarganegaraan (citizenship) mengandung kesamaan manusia yang berasal dari keanggotaannya dalam komunitas politik nasional dan diwujudkan dalam hak-hak yang sama yang dimiliki oleh semua warganegara. Warganegara berperan dalam masukan (partisipasi) dan keluaran (distribusi) fungsi-fungsi pemerintahan. Pengutamaan dari yang universalistik terhadap yang partikularistik dalam hubungan pemerintahan dengan warga negara sangat penting bagi perwujudan hak-hak warganegara tersebut. Secara yuridis ini dirumuskan sebagai kesamaan warganegara di hadapan hukum (equality before the law). Demikian juga pengutamaan alokasi peranan politik dan birokrasi atas dasar prestasi dan bukan atas dasar norma-norma tradisional yang

diwariskan (ascriptive) mendukung proses kesamaan (Coleman, 1971: 77-78).

Dimensi budaya kedua dari politik adalah legitimasi politik. sumber dari otoritas dan legitimitas politik dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berubah. Kita dapat meminjam istilah yang dipakai oleh L. Binder (1971), yaitu perubahan sumber legitimasi politik dari transendental kepada imanen, dari sumber yang sakral kepada konsensus. Kekuasaan tidak lagi berasal dari "dunia sana", tetapi dari rakyat, ada di tangan rakyat. Inilah yang dimaksud dengan "imanen". Kekuasaan bersumber dan berdasar atas konstitusi. Dengan lain perkataan prinsip demokrasi mencerminkan perubahan tersebut. Seperti dikatakan Huntington (1968: 34) "pertama-tama modernisasi politik mencakup rasionalitas otoritas, penggantian sebagian besar otorisasi tradisional, keagamaan, keluarga dan kesukuan. Perubahan ini mengimplikasikan bahwa pemerintah adalah hasil manusia, bukan hasil alamiah atau Allah. Pancasila dan UUD 1945 merupakan sistem legitimasi. Kekuatan dari legitimasi ini tergantung pada dua hal, yaitu "performance capacity" dari pemerintah dan pemahaman serta perasaan rakyat terhadap sistem legitimasi tersebut. Yang pertama menyangkut kemampuan mewujudkan prinsip dalam Pancasila dan UUD 45. Tersebut dan kedua menyangkut proses sosialisasi dari Pancasila dan UUD 45. Salah satu ciri kekuasaan tradisional ialah bahwa kekuasaan itu dipandang "given" dan tidak dipertanyakan. Sebaliknya dalam modernisasi segala sesuatu dapat dipertanyakan dan harus diterangkan secara rasional. Maka keterbukaan dan penjelasan yang rasional merupakan faktor yang

ikut menentukan terbentuknya nilai-nilai Pancasila menjadi etos (Sastraprteja, 1991: 150).

Dimensi budaya ketiga dari politik adalah partisipasi. Ini terkait erat dengan dimensi pertama ialah identitas baru sebagai warganegara dan dengan dimensi kedua, yaitu bahwa kekuasaan berasal dari rakyat sendiri. Warganegara adalah manusia yang otonom, yang secara ideal, merupakan manifestasi dari semangat kebebasan dan persamaan seorang warga republik. Warganegara adalah seorang manusia yang merdeka dan mempunyai harga diri, yang mampu secara efektif mengorganisir dan memprakarsai kebijakan politik.

Partisipasi adalah keterlibatan warga-negara dalam proses politik yang intinya adalah proses pengambilan keputusan. Myron Weiner menyebut tiga aspek dari partisipasi. Pertama, partisipasi adalah tindakan, termasuk tindakan verbal bukan hanya sikap atau perasaan subyektif. Aspek kedua, ialah kegiatan itu keluar dari kehendak warganegara. Tindakan-tindakan yang diwajibkan atau dipaksakan tidak digolongkan dalam partisipasi. Ketiga, partisipasi mengandaikan adanya pilihan. Mobilisasi paksaan tidak dapat disebut partisipasi. Yang menjadi masalah dalam setiap pembangunan politik ialah bagaimana menciptakan etos yang akan mendorong kemandirian individu dan membantu warganegara melihat dirinya sebagai partisipan politik. Dua hal paling sedikit perlu ditempuh, yaitu peningkatan kemampuan dan penciptaan kesempatan. Yang pertama menyangkut pendidikan umum dan pendidikan politik yang harus dijalankan dengan cara partisipatif juga. Cara pendidikan terbaik untuk partisipasi adalah partisipasi itu sendiri. Yang kedua

ialah penciptaan kesempatan untuk berpartisipasi dengan menciptakan struktur-struktur yang membuka peluang. Salah satu yang penting adalah akses kepada informasi. Masyarakat tak mungkin berpartisipasi dalam politik kalau mereka tidak memperoleh informasi. Dengan cara itu masyarakat dimungkinkan untuk ikut serta mencari pemecahan berbagai masalah yang dihadapi bangsa. "Partisipasi sejati, yang meningkatkan kesadaran partisipan akan nilai, masalah dan kemungkinan untuk mengadakan pilihan-pilihan, yang mempengaruhi isi dan pembangunan, yang melahirkan cara baru untuk bekerja, dan juga yang menjamin hak partisipan akan bagian yang adil dalam hasil-hasil pembangunan, merupakan aspirasi yang *elusive*. Tetapi perubahan aspirasi ini menjadi kenyataan pada akhirnya akan terbukti sebagai prasyarat utama bagi suatu gaya pembangunan yang memungkinkan masyarakat menciptakan kesejahteraan dalam jangka panjang (Wolfe, 1980: 17).

C. Kebudayaan dan Etnografi

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan memposisikan informan dan atau responden sebagai pihak yang aktif dalam menafsirkan dunia sekitarnya. Secara lebih spesifik pendekatan kualitatif ini akan memilih etnografi sebagai pilihan metode. Metode ini meskipun lazim dipakai dalam antropologi, tetapi juga sering dipakai dalam penelitian kajian budaya.

Secara keseluruhan, Cultural Studies lebih memilih metode kualitatif dengan fokus makna kultural.

Karya-karya dalam Cultural Studies terpusat pada tiga macam pendekatan:

- Etnografi, yang sering kali dikaitkan dengan pendekatan kulturalis dan lebih menekankan "pengalaman nyata".
- Beberapa macam pendekatan tekstual, yang cenderung memanfaatkan semiotika, pascastrukturalisme dan dekonstruksi Derridean;
- Beberapa studi resepsi (reception studies), yang akar teoritisnya bersifat eklektis (Barker, 2000: 27).

Peneliti menyakini bahwa etnografi sebagai sebuah pendekatan dalam upaya mengungkap dan menjelaskan berbagai fakta dan makna kultural yang berkaitan dengan isu ideologi Pancasila dalam dinamika politik pada era reformasi. Etnografi adalah pendekatan empiris dan teretis yang diwarisi dari antropologi yang berusaha membuat deskripsi terinci dan analisis kebudayaan yang didasarkan pada kerja lapangan yang intensif. Dalam konsep klasik, seorang Etnograf berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat selama kurun waktu yang relatif lama, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan dan mengajukan pertanyaan" (Hammersley dan Atkinson, 1983:2). Tujuannya adalah menghasilkan apa yang dalam istilah Geertz (1973) dikenal sebagai "deskripsi-mendalam" dari "multiplisitas struktur konseptual yang kompleks", termasuk berbagai asumsi yang dituturkan dan diterima apa adanya tentang kehidupan kultural. Etnografi berkonsentrasi pada detail kehidupan lokal dan pada saat yang sama

mengaitkan mereka dengan proses-proses sosial yang lebih luas (Barker, 2000: 28).

D. Mewacanakan Pancasila

Ideologi Pancasila merupakan kesepakatan politik, kultural, dan moral bangsa Indonesia yang plural penuh keberagaman. Dalam sejarahnya hingga mencapai kesepakatan itu harus melalui pergulatan panjang mengikuti dinamika politik, dan bahkan diwarnai konflik yang memakan korban jiwa. Di antara kelompok-kelompok politik yang berkontestasi dalam panggung politik Indonesia kontemporer, terus memproduksi wacana yang mempersoalkan ideologi bangsa. Meskipun nuansa itu tidak selalu manifest, tetapi secara kontinyu terus hidup laten mengiringi perjalanan bangsa mencari identitas. Karena itu wacana ideologi negara terus mengalami pasang-surut mengikuti isu dan dinamika permasalahan dalam berbangsa.

Pada era reformasi situasi pasang-surut wacana Pancasila sebagai ideologi negara juga terus mewarnai dinamika tarik-menarik kekuatan politik dalam menghadapi permasalahan yang timbul. Setidaknya ada dua faktor penting yang membuat wacana Pancasila pada era reformasi mengalami pasang-surut, yaitu pertama munculnya peristiwa intoleransi baik berbasis perbedaan agama maupun etnis, dan kedua menguatnya gaya hidup modern yang dieksploitasi konsumsi.

Ketika kehidupan berbangsa sedang dihadapkan pada munculnya berbagai tindak intoleransi yang bersumber pada keyakinan agama, maka wacana Pancasila menguat. Pada saat terjadi konflik antar agama di Ambon Maluku, dan kemudian meluas

hingga Poso Sulawesi, produksi wacana Pancasila sebagai dasar kehidupan kerukunan umat beragama mengalami pasang. Berbagai pemberitaan yang bersumber dari kegiatan akademik maupun kegiatan nyata bermunculan di media massa. Para narasumber menyebarkan wacana tentang pentingnya Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Segenap tokoh masyarakat pun ikut memproduksi wacana Pancasila agar tetap menjadi rujukan untuk saling menghormati. Para tokoh lintas agama melakukan pertemuan sebagai bagian dari produksi wacana yang disebarluaskan oleh media massa. Tokoh lintas agama mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai pemandu kehidupan berbangsa. Pluralisme dan multikulturalisme adalah paham yang imperatif, dan kesadaran akan pentingnya saling berkomunikasi dan menghargai adalah penting. Wacana Pancasila yang sarat nilai pluralisme dan multikulturalisme menguat dalam media massa maupun dalam praksis bermasyarakat.

Sementara itu jika terjadi konflik-konflik antaretnis juga berbanding lurus dengan peningkatan produksi wacana Pancasila. Ketika terjadi konflik antar etnis di beberapa titik konflik di Kalimantan pada awal milenium 2000, antara suku Dayak dan Madura, wacana yang diproduksi oleh segenap tokoh juga meningkat. Isu persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia terangkat kembali, dan diskusi tentang NKRI pun menyebar di berbagai forum dan pemberitaan media massa. Negara yang terasa lemah, dan kurang berdaya menghadapi permasalahan konflik etnis pun diingatkan agar menggunakan Pancasila sebagai instrumen pemersatu. Pada situasi semacam itu, wacana

Pancasila menguat, dan orang pun ingat bahwa bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang menekankan pentingnya persatuan sebagaimana tercantum pada sila tiga yaitu Persatuan Indonesia.

Namun demikian, ketika Indonesia menghadapi persoalan di seputar isu kesejahteraan, tidak diikuti oleh menguatkan produksi wacana Pancasila. Ketika dihadapkan pada masalah kemiskinan misalnya, tidak mengaitkannya dengan nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Berbagai wacana yang berkaitan dengan masalah kemiskinan lebih banyak menyalahkan pemerintah, dan merujuk pada penjelasan yang bersumber dari teori-teori sosial yang konteksnya masyarakat Barat. Jarang sekali wacana penanggulangan kemiskinan yang menawarkan konsep yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Konsep ekonomi Pancasila sebagaimana yang digagas oleh Mubyarto misalnya, tidak menjadi wacana dominan dalam pembahasan konseptual.

Ketika terjadi eksploitasi atas buruh dalam masyarakat industri, atau ketika menghadapi masalah perjuangan buruh, juga tidak mengangkat wacana hubungan produksi Pancasila sebagaimana yang digagas oleh pemikir era Orde Baru, yang dikenal dengan hubungan industrial Pancasila. Perdebatannya lebih mengarah pada lemahnya negara yang kurang peduli terhadap nasib buruh. Atau hanya berkisar pada perdebatan bagaimana meningkatkan upah buruh, tidak pernah mencari akar persoalannya pada ranah sistem ketatanegaraan yang berideologi Pancasila. Terasa ironis, justru suatu negara yang memiliki Pancasila

yang sarat dengan nilai keadilan, dan menjadikannya sebagai ideologi negara, tetapi tidak pernah menempatkannya sebagai rujukan utama dalam penyelesaian kesejahteraan buruh. Jadi di sini, wacana Pancasila kurang berkembang ketika menghadapi permasalahan kesejahteraan, kemiskinan, dan eksploitasi buruh. Sebuah ironi di negara yang berdasarkan Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai populis.

Wacana Pancasila dan Agama

Pada era reformasi, wacana Pancasila benar-benar mengalami surut, sementara wacana keagamaan semakin menguat dan bahkan cenderung mendominasi. Di kalangan instansi pemerintah pun discourse tentang Pancasila suara dan getarannya sangat lemah. Tidak ada lagi forum-forum diskusi yang mengangkat tema-tema dan topik-topik Pancasila sebagai ideologi negara. Bahkan tidak sedikit aparat birokrasi, terutama di kalangan muda, yang tidak hapal Pancasila. Beberapa produk perundangan yang menjadi payung hukum program pembangunan daerah seperti Perda misalnya, jarang sekali yang menjadikan Pancasila sebagai konsideran. Popularitas Pancasila dalam jajaran instansi pemerintah justru mengalami penurunan secara signifikan. Ini sebuah ironi dalam negara berdasarkan Pancasila.

Situasi yang sama juga terjadi dalam lembaga pendidikan yang antara lain berfungsi sebagai sosialisasi nilai. Sejak era reformasi, pelajaran Pancasila dihapus dan hanya masuk dalam sub pokok bahasan pelajaran Pendidikan Kewargaan. Bahkan Undang-undang Sistem Pendidikan

Nasional, tidak menyebut sama sekali Pancasila. Akibatnya, popularitas Pancasila di kalangan murid dan mahasiswa menjadi hilang kalah dengan wacana keagamaan. Survey Gerakan Nasionalis 2006/GMPI (Kompas 4 Maret 2008) tentang way of life mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Indonesia (UI, IPB, UNPAD, UGM, UNAIR, UNIBRAW, ITB, UNHAS, UNAND, UNSRI, dan UNSIAH) ditunjukkan kecenderungan mahasiswa menjadikan syariah sebagai way of life mereka. Data yang diperoleh menunjukkan, 80% memilih syariah, 15% nasionalis, dan hanya 5% memilih Pancasila sebagai way of life mereka. Sedangkan, menurut Survey Pusat Kajian Islam dan Perdamaian yang dilakukan terhadap siswa dan guru agama Islam pada Sekolah Menengah Atas di Jakarta menunjukkan kecenderungan yang hampir sama dimana sebanyak 76% memilih syariah, 17% memilih fungsi's, dan sebanyak 7% memilih Pancasila.

Hal yang berbeda terjadi di era Reformasi yaitu Pancasila mengalami pergeseran dari state-center menjadi people-center yang telah terjadinya banyak perubahan dan pergeseran mengenai posisi dan peran Pancasila itu sendiri. Lembaga-lembaga pada masa Orde Baru yang bertujuan untuk menguatkan posisi dan peran Pancasila ditolak dan bahkan dibubarkan di era Reformasi. Pergeseran dari model state-center menjadi people-center berdampak pada semakin menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Pancasila. Di sini pun terlihat bahwa telah terjadi sebuah proses delegitimasi terhadap Pancasila yang sejalan dengan liberalisasi yang semakin mengental. (Kompas, 31 Agustus 2010).

Demikian pula, globalisasi dengan demokratisasi, HAM, pasar bebas dan lingkungan hidup serta dampak bawanya (liberalisme, kapitalisme, sekularisme, dan komunisme) mengambil peran dalam proses penolakan Pancasila. Pancasila melalui penjabaran sila-silanya yang agamis banyak bertentangan dengan ideologi Barat yang cenderung memisahkan dan bahkan mengabaikan agama seperti komunisme. Hal ini oleh D.E. Smith (1970: 10) disebut sebagai upaya memutus peran politik agama (Islam) dan membuka ruang pada sekularisasi politik.

Dalam perkembangannya, muncul berbagai wacana untuk 'menghangatkan' kembali debat mengenai Pancasila. Di era Reformasi misalnya, muncul wacana yang menempatkan Pancasila sebagai sesuatu sudah final dan karena itu tidak terbuka untuk penafsiran baru. Selain itu muncul wacana lain (Ali, 2009: 52-56), Pancasila merupakan kontrak sosial, dan karena itu ia tidak lagi dianggap sebagai ideologi negara seperti pendapat Onghokham, Armahedy Mahzar dan Garin Nugroho (Abdullah, 2010: 23). Dengan kata lain, Pancasila disamakan kedudukannya dengan Magna Charta di Inggris atau Bill of Rights di Amerika Serikat.

Fakta lain memperlihatkan bahwa Pancasila mengalami penolakan khususnya dari kalangan yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat melalui upaya mempertentangkan agama (Islam) dan Pancasila; mengubah NKRI sebagai Negara Islam Indonesia; pemberlakuan kembali Piagam Jakarta seperti yang diwacanakan oleh partai-partai Islam menjelang pemilu 2009 lalu, pemberlakuan syariat Islam melalui Peraturan Daerah, tuntutan beberapa ormas

non-politis terhadap penegakan Khilafah Islamiyah menggantikan negara Pancasila.

Adanya tuntutan dari kelompok tertentu mengenai perubahan ideologi negara merupakan tanda dari adanya persoalan yang mendasar. Tuntutan tersebut tidak muncul begitu saja karena pada fakta sejarahnya terdapat indikasi yang mengarah kuat pada perwujudan ide tersebut. Kembali ke Piagam Jakarta merupakan isu sentral yang diusung oleh beberapa kelompok seperti partai politik Islam khususnya menjelang pemilu. Hal ini tidak terjadi secara terbuka di era Orde Baru yang dominasi partai politik beraliran nasionalis sangat kuat. Wujud nyata yang diinginkan oleh aspirasi ini adalah perubahan negara Indonesia menjadi negara Islam Indonesia melalui perubahan dasar negara dari Pancasila menjadi Islam sehingga Indonesia berwujud menjadi sebuah khilafah.

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh adanya upaya-upaya tersebut di atas, terhadap Pancasila adalah munculnya ideologi baru dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Artinya, Pancasila bukan lagi sebagai sumber utama karena telah lahir sumber atau pedoman baru. Jika demikian adanya maka identitas ke-Indonesia-an bangsa akan hancur sehingga neo-kolonialisme muncul dan bahkan berkuasa yang pada akhirnya dalam operasionalnya akan menyedot pula sumber kekayaan Indonesia khususnya sumber daya alam seperti minyak dan energi. Akhirnya, manusia Indonesia hanya dijadikan sebagai pengguna/konsumen bukan produsen sehingga kemiskinan dan ketimpangan akses akan terjadi di mana-mana. Hal tersebut saat ini mengarah pada bangsa Indonesia, yang pengaruh

kuat asingnya sangat dominan sehingga terjadi penaklukan dan pemiskinan terstruktur terhadap masyarakat.

E. Penutup

Realitas sekarang ini tidak sejalan dengan Pancasila karena kemiskinan masih terjadi di mana-mana, rasa keadilan masih rendah, konflik antar-kelompok semakin marak, bahkan simbol-simbol negara masih sering dipakai untuk kepentingan politik dan golongan tertentu (Ali, 2009: 81). Pada sila pertama misalnya yang mengusung ide ketuhanan sangat bertentangan karena yang muncul adalah semangat fundamentalisme yang menciptakan ruang untuk saling menghancurkan (membandingkan Pancasila dengan agama). Sila kedua yang intinya menjunjung tinggi semangat kemanusiaan hampir tidak ada karena yang berlaku adalah 'hukum rimba', siapa yang kuat ia berkuasa. Sila ketiga yang pada intinya menyerukan persatuan sangat bertolak belakang yang semua dipaksa menjadi, misalnya orang "Jawa", Sumatera, atau yang lain sehingga memecah persatuan atau negara kesatuan dibandingkan dengan disintegrasi. Sila keempat mengenai musyawarah-mufakat tidak tampak, justru yang kental adalah liberalisme atau pemilihan melalui voting (bukan demokrasi). Sila kelima yakni keadilan sosial sangat sulit terwujud yang 'adil dan makmur' dibalik menjadi 'makmur dan adil' artinya, makmur dulu baru adil karena ekonomi yang mensejahterakan hanya dimiliki dan dinikmati oleh segelintir orang (Sukendro, 2012) atau keadilan dibandingkan dengan kapitalisme.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa Pancasila mau tidak mau harus direvitalisasi kembali sehingga nilai-nilainya tetap relevan dengan situasi actual masyarakat. Ketua Umum PBNU, Said Agil Siradj, mengemukakan pentingnya mendudukkan kembali Pancasila pada posisi yang tepat. Menurut dia Pancasila tidak lebih dipahami pada level instrumental semata yaitu sebagai alat pemersatu bangsa (NU Online, 03 Juni 2010). Oleh karena itu, pentingnya Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa tidak hanya dipahami berdasarkan teks dengan kelima silanya, melainkan juga harus dipahami dari konteksnya sebagai sumber hukum tertinggi.

Daftar Pustaka

- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Amstrong Karen. 2012. *Sejarah Tuhan*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana.
- Bakry, Noor Ms. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barker, Chris, 2000, *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage Publications.
- Buku Pintar Kompas 2011. 2012. Penerbit Kompas. Jakarta.
- Coleman. James. S. 1971. "The Development Syndrome: Differentiation–Equality–Capacity," dalam L. Binder et al. *Crisis and Sequences in Political Development*. Princeton: Princeton University Press.
- Dzakirin Ahmad. *Kebangkitan Pos Islamisme Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki memenangkan Pemilu*.
- Eagleton, Terry. 1991. *Ideology: an Introduction*. USA: Vestco.
- Gramsci, A. 1968. *Prison Notebooks*. London: Lawrence & Wishart.
- _____. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*, eds Q. Hoare and G. Nowell-Smith. London: Lawrence & Wishart.
- Hikam, Mohammad AS. 1996. "Bahasa dan Politik: Penghampiran Discursive Practice", dalam Yudi Latif dan Ida Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Hutington. P. Samuel. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Jorgensen, Marianne. W dan Louise J. Phillips. 2007. *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim Mulyawan. 2010. *Rindu Pancasila*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Kompas, *Konsep dan Ide Desentralisasi di Indonesia*, 23 Juni 2012.
- Kompas, *Pancasila dan Wawasan Kebangsaan*, 31 Agustus 2010.
- Kompas, *Pemulihan Ekonomi Asia Diragukan*, 10 Oktober 1998.
- Lubis Mochtar. 2012. *Manusia Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2003. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2007. *Teori Sosiolog: Dari Teori Klasik Sampai Teori Sosial Postmoderen*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Runsiman David. 2012. *Politik Muka Dua*. Jogyakarta. Said Anwar Muhammad (tanpa tahun). *Penerapan Syariat Islam Dalam Undang-Undang, Belajar dari Pengalaman Mesir*.
- Santoso, Nur Sayyid Kristiva (tanpa tahun). *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat*.
- Sastrapratedja, M. 1992. "Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya". Dalam *Pancasila sebagai Ideologi*, disunting Oetoyo Oesman dan Alfian. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Smith, D.E. 1970. *Religion and Political Development*. Boston: Little, Brown and Company.
- Sukendro, Greg Genep. 2012. *Pancasila: Riwayatmu Kini*. Jakarta: Yayasan Tifa.
- Surya, Aji. 2012. *Geliat Islam di Rusia*. Buku Kompas, Jakarta.
- Suwarno, P.J. 2009. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio-Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Taniredja Tukiran, Afandi Muhammad, dan Miftah Faridli Efi. 2011. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Bandung: Alfa Beta.
- Thomas, Linda dan Shan Wareing. 2007. *Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thompson, J. B. 2004. *Kritik Ideologi Global Teori Sosial Kritis Tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Wazis Kun 2012. *Media Massa dan Konstruksi Realitas*. Aditya Media Publishing. Jogjakarta.
- Yuwono, Untung. 2008. "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami: sebuah Analisis Wacana Kritis tentang Wacana Anti-poligami", dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 10, Nomor 1 April. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Bacaan Pendukung:

- Darji Darmodiharjo. 1978. *Santiaji Pancasila*. Laboratorium Pancasila IKIP Malang.
- Darji Darmodiharjo, C. S. T. Kansil, Kasmiran Wuryo Warga. 1979. *Negara Pancasila*. Balai Pustaka.
- Darji Darmodiharjo. 1979. *Pancasila: suatu orientasi singkat : dilengkapi dengan Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR no. II/MPR/1978)*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Darji Darmodiharjo. 1979. *Menjadi Warga Negara Pancasila*. Balai Pustaka: Jakarta
- Faisal Ismail. 2010. *Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholish Madjid Seputar Isu Sekularisasi dalam Islam*.
- Syafii Ma'arif. 2009. *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung: Penerbit Mizan.